

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintahan Daerah Padang Pariaman

Gimeilia Sarma^{1*}, Halkadri Fitra², Dewi Pebriyani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

*Korespondensi: gimeiliasarma10@gmail.com

Abstract

This study aims to see 1) The application of accrual-based accounting has an effect on the quality of financial reports in the Padang Pariaman Padang Pariaman Regional Government, 2) Technology and information have a significant influence on the quality of financial reports in the Padang Pariaman Padang Pariaman Regional Government. 3) The internal control system affects the quality of financial reports in the Padang Pariaman Regional Government. Padang Pariaman. 4) The application of accrual-based accounting, internal control systems and information technology have a significant influence on the quality of financial reports in the Padang Pariaman Regional Government. This study utilizes a quantitative design because this study is presented statistically. The population used in this research is 44 Regional Apparatus Work Units in the financial sector throughout Padang Pariaman Regency consisting of 427 employees based on data from the Personnel Service, Padang Pariaman Regency Education and Training Office in 2019. This research was carried out by distributing 207 questionnaires which will be distributed directly to the public. Regional Apparatus Work Unit in the financial section of Padang Pariaman Regency. Analysis of the data used in this study is using multiple regression analysis. Based on the results of the study, it was found that 1) The implementation of accrual-based accounting had a significant effect on the quality of the financial statements of the Padang Pariaman Regency Government. 2) The internal control system has a significant effect on the quality of the financial reports of the Padang Pariaman Regency Government. 3) The use of information technology has a significant effect on the quality of the financial statements of the Regional Government of Padang Pariaman Regency..

Keywords: *accrual-based accounting implementation; internal control system; information technology; financial report quality.*

How to cite

Sarma, G., Fitra, H., & Pebriyani, D. (2023). Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada Pemerintahan Daerah Padang Pariaman. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 69-83. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.5>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Informasi keuangan di bidang sektor publik memiliki kontribusi penting dalam rencana mengadakan tanggungjawab bagian masyarakat. Semakin banyaknya syarat terhadap implementasi akuntabilitas sektor publik memperlebar kepentingan akan kejelasan keterangan finansial di sektor publik. Fakta keuangan ini berguna selaku asas evaluasi untuk metode pengutipan ketetapan, maka saat ini kapasitas akuntansi sektor publik memiliki kedudukan berarti saat mengadakan laporan keuangan sebagai pelaksanaan tanggung jawab publik (Nordian & Hertianti, 2006). Tolak ukur akuntansi penguasa yang terutama di Indonesia muncul saat tahun 2005 yakni bentuk akuntansi berasas kas mengarah akrual (*cash toward accrual*) serta melahirkan empat informasi finansial, diantaranya yakni informasi perwujudan anggaran, informasi aliran kas, penimbang serta risalah dari informasi finansial. Akuntansi instansi pemerintahan berasaskan kas yang masih harus dibayar (CTA) belum bisa melahirkan laporan sesuai yang dimintakan. Oleh karena itu amat akurat andaikan Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara menitikkan supaya penguasa dalam hal ini pemerintah mengamalkan akuntansi berasas akrual. (Siregar, 2015)

Implementasi Ketetapan Akuntansi Berasas Akrual di instansi Pemda ditetapkan oleh pasal 10 ayat (2) dalam Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menyatakan implementasi tolak ukur Akuntansi Pemerintahan berasas akrual atas pemerintah daerah sekurang-kurangnya sejak tahun perkiraan 2015. Pertukaran dasar tertulis selain dititipkan pada Undang-Undang Keuangan Negara, transformasi tersebut juga mampu menyodorkan keterangan lengkap dari kedudukan finansial dan meyodorkan laporan yang sepatutnya tentang perihal hak dan kewajiban serta berguna untuk menilai kemampuan. Diteruskan melalui adanya pelaksanaan itu, kapasitas laporan finansial naik semakin baik. (Wijayanti & Rahmayati, 2018)

Kapasitas informasi finansial pemerintah daerah yang tinggi pun diakibatkan oleh seberapa baik metode kontrol pengendalian internal yang dipunyai untuk pemerintah daerah. Metode kontrol internal ini amat berarti karena pengendalian internal yang sesuai amat diperlukan demi menaikkan mutu informasi finansial. (Widari & Sutrisno, 2017)

Metode pengontrolan intern pemerintah menggambarkan sistem menyeluruh pada langkah maupun tindakan yang dilaksanakan dengan berkesinambungan oleh pimpinan dan aparatur pegawai demi menyerahkan kepercayaan yang akseptabel untuk tergapainya maksud instansi melewati tindakan yang efektif dan efisien, kepercayaan informasi finansial serta kepatuhan pada aturan perundangan.

Teknologi informasi menggambarkan penyokong kepada pelaksanaan ketetapan akuntansi instansi pemerintahan berasas akrual. Akuntansi instansi pemerintahan berasas akrual sukar divisualkan sehingga lulus disusun andaikan tidak didukung dari teknologi informasi. Atas kuantitas perundingan satuan kerja yang berlipat-lipat, tersedianya pendataan dan pemberitahuan dalam materi akuntansi dan materi peliputan, juga metode pengukuhan yang sukar hingga dibutuhkan penerapan akuntansi berasas teknologi informasi (Siregar, 2015). Pengkajian yang dilakukan Mutiana, Diantimala, dan Zuraida (2017) mendapatkan buah pikir kalau teknologi informasi memiliki pengaruh pada kapasitas informasi finansial. Bersumber pada deskripsi terkandung, implementasi laporan yang membantu serta membantu fungsi positif kepada semua aksi dalam institusi.

Fakta yang timbul dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sudah diverifikasi pada Sekda Kab. Padang Pariaman, beliau memastikan asumsi oleh Kejangung RI tentang penyelewengan keuangan. BPK pada hakikatnya mengungkapkan bahwa laporan keuangan Kab. Padang Pariaman memperoleh penilaian wajib tanpa pengecualian (WTP). Dari fakta yang diuraikan didapatkan hasil bahwa terdapat kekurangan fungsi sistem pengendalian intern yang terdapat di Kab. Padang Pariaman, sampai-sampai berdampak

terhadap kualitas laporan keuangan yang disuguhkan, maka perlu munculnya fungsi pengendalian intern agar mendapatkan bahwa fakta laporan keuangan yang disuguhkan pantas serta kredibilitas.

Undang-undang Nomor 71 tahun 2010 mengenai ketetapan akuntansi instansi pemerintahan ketetapan Akuntansi Pemerintahan sebagai halnya instruksi, menyatakan masing-masing objek pelaporan serta objek akuntansi pada instansi pemerintah yang berada pusat wajib mengimplementasikan asas akrual dalam pembentukan informasi finansial instansi pemerintah, segala manajemen keuangan atas satuan tugas pemerintah pusat wajib berupaya untuk menerapkan basis akrual. Dalam menindaki hal tersebut pada Kantor Pemerintahan Daerah Padang Pariaman wajib melaksanakan pengembangan kualitas profesionalisme aparatur manajemen keuangan agar sanggup membiasakan dan menerapkan secara baik dari transformasi tersebut, sanggup melaksanakan fungsi secara kompeten, menaati norma pemerintah dan bisa menciptakan laporan keuangan bertanggung jawab serasi berdasarkan peraturan, dalam ajang menyampaikan keterangan yang valid, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat di daerah Padang Pariaman.

Komponen berikutnya adalah media pendukung berbentuk teknologi informasi seperti peranti keras dan peranti lunak yang layak dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penunjang yang akan meringankan BPKD dalam melangsungkan tugas seperti tersajinya komputer dan software yang bergandengan dengan keperluan dalam pelaksanaan SAP. Pelaksanaan metode akuntansi berbasis akrual menggambarkan prosedur yang kontinu dan selaras. Impak yang diciptakan dari implementasi skema ini tidak dapat diamati dalam waktu yang ringkas. Kesuksesan atau kekandasan implementasi akuntansi berasas akrual di instansi pemerintah tidak luput dari kedudukan perangkat kerja dan dampak dari dampak-dampak yang ada pada perangkat kerja tersebut, sejak dari aspek kapasitas manusia yaitu kualitas pendidikan karyawan, training yang disuguhkan, serta dasar tingkat akademik pimpinan, aspek institusional seperti kapasitas teknologi informasi. Apabila bagian persiapan dan pengembangan daerah Padang Pariaman hendak mengantongi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten terhadap penggarapan laporan keuangan dengan memanfaatkan metode akuntansi berasas akrual, instansi pemerintahan bisa melaksanakan bimbingan dan training serta pengarahan terhadap sumber daya manusia.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Asas akrual merupakan suatu asas akuntansi yang dapat dimanfaatkan bagi laporan keuangan pemerintah, dimana setiap penghasilan, tanggung jawab, aktiva, tanggungjawab dan keadilan disetujui saat waktu berlangsungnya negosiasi atau dalam era peristiwa atau situasi alam berakibat dalam finansial instansi pemerintah tanpa mengindahkan waktu deposito atau sama deposito diterima atau diberikan. Dari hasil kajian yang dilakukan Wijayanti dan Rahmayati (2018), Permendagri Nomor 64 tahun 2013 mengenai Pelaksanaan Ketetapan Akuntansi Pemerintahan Berasas Akrual atas Pemda Pasal 1 ayat (10) mendeskripsikan jika asas akrual merupakan dasar akuntansi yang membenarkan dampak perundingan serta kejadian pada saat perundingan serta kejadian tersebut timbul, tanpa mengamati saat kas diterima atau dibayar.

Peralihan pendataan informasi finansial dari asas kas memerankan asas akrual pada akuntansi instansi pemerintahan menggambarkan serpihan dari kontruksi pembaruan finansial negara yakni yang dititipkan dari 12 tahun lalu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Begitu pula sesuai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai ketetapan Akuntansi Sektor Publik, dan yang paling baru ialah diterbitkannya Permendagri

Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Implementasi Ketetapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam instansi daerah (Wijayanti & Rahmayati, 2018).

Indikator Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Dari hasil kajian Wijayanti dan Rahmayati (2018), demi memperkirakan penerapan akuntansi berbasis akrual dilaksanakan dengan memakai 3 parameter, yaitu: membenaran, penilaian dan penyingkapan. Berasaskan Pemendagri No. 64 tahun 2013 mendeskripsikan jenis parameter tersebut yakni: pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan

Menurut kajian penelitian yang dilakukan oleh Mardiana dan Fahlevi (2017) yang mewujudkan keluaran ulasan yang dijalankan dari IFAC *Public Sector Committee* (2002) membuktikan kalau pemberitahuan berdasarkan akrual berfungsi pada menilai kapasitas pemerintah yang terkait tentang biaya pelayanan, akomodasi, ketepatangunaan serta perolehan sasaran. Melalui informasi berbasis akrual, bisa menunjang pemakai dalam mengenali kedudukan finansial pemerintah serta transformasinya.

Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi merupakan satu teknologi pada penggarapan infromasinya memanfaatkan perlengkapan komputer bagus peranti lunak (*software*), data dasar sampai jaringan demi meyokong masyarakat untuk menggarap informasi, merumuskan, menyimpan, menciptakan, mengedarkan data sampai dengan menyulap data.

Teknologi informasi mempunyai fungsi amat bernilai karena dalam mengadakan laporan dari manajemen finansial daerah, instansi daerah dihimbau bisa mengadakan informasi atas nilai pnerimaan dan belanja daerah (APBD) dan laporan akuntansi yang hendak dimanfaatkan eksekutif masyarakat pada melaksanakan peran persiapan dan pengontrolan lembaga dengan tepat waktu, bermakna, tepat serta komplet (Andriani, 2010).

Deskripsi Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 mengenai Metode Laporan Finansial Daerah dalam metode laporan finansial dinyatakan bahwa instansi pusat serta instasi daerah harus meluaskan dan menggunakan perkembangan teknologi informasi bagi memajukan kapabilitas untuk memajemen finansial serta menyalurkan laporan finansial terhadap pelayanan masyarkat. Penggunaan teknologi dan informasi yang mencakup teknologi komputer serta teknologi dan komunikasi pada memajemen finansial daerah mengembangkan pada prosedur perundingan kendatipun informasi lainnya, kermatan pada anggaran serta menyelesaikan informasi yang diinginkan dengan tepat. (Basukianto, 2015).

Pola Pengontrolan Intern

Metode pengontrolan intern instansi adalah prosedur yang terkonsolidasi dalam aksi maupun tindakan yang dilaksanakan dengan cara berkesinambungan oleh pmpinan dan aparaturnya untuk menyodorkan ketentuan yang layak untuk teraihnya arah instansi lewat tindakan yang ampuh serta efisien, kecakapan informasi finansial dan ketentuan bagi perundang-undangan. Pengontrolan intern adalah satu sistem yang dirancang untuk menyampaikan ketetapan yang layak tentang perolehan sasaran dan daya guna penerapan agenda dan tindakan serta ditaatinya norma perundang-undangan dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2008 mengenai sistem pengontrolan intern pemerintah. (Mardiana & Fahlevi, 2017).

Metode pengontrolan internal instansi Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengatakan untuk memunculkan integritas berguna serta membantu bagi pengamalan metode pengontrolan internal di bagian kerja, pimpinan lembaga instansi pemerintah harus menghadirkan serta menegakkan bagian pengontrolan lewat:

- a. Pemeliharaan moralitas serta nilai keahlian.
- b. Tanggung jawab pada kapabilitas.

- c. Relevansi yang mendukung.
- d. Penciptaan pola institusi yang cocok dengan keperluan.
- e. Perwakilan otoritas dan kewajiban yang cocok.
- f. Pengolahan dan implementasi strategi yang positif tentang penyelenggaraan sumber daya manusia.
- g. Pelaksanaan fungsi instansi pengontrolan internal instansi pemerintah yang berhasil.
- h. Afiliasi aktifitas yang sehat dengan organisasi lembaga terkait.

Pimpinan lembaga pemerintah harus melaksanakan evaluasi efek yang terdiri dari pengenalan efek dan telaah efek yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 mengenai sistem pengendalian intern lembaga pemerintah pasal 13. Demi penilaian resiko, pimpinan lembaga pemerintah wajib memutuskan sasaran lembaga pemerintah dan sasaran pada kategori tindakan dengan berpatokan dari norma perundang-undangan.

Pimpinan lembaga pemerintah harus mengadakan tindakan pengontrolan serasi dengan standar, kerumitan dan ciri dari kewajiban serta peranan lembaga pemerintah yang berkaitan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 mengenai metode pengontrolan internal pasal 18. Aksi pengontrolan paling tidak mempunyai keunikan sebagai berikut:

- a. Aktifitas pengontrolan diutamakan dalam tindakan inti lembaga pemerintah.
- b. Aktifitas pengontrolan wajib harus dihubungkan dengan prosedur evaluasi resiko.
- c. Aktifitas pengontrolan yang ditentukan diserasikan dengan karakteristik lembaga pemerintah.
- d. Strategi dan proses wajib dimantapkan secara tertulis.
- e. Proses yang sudah dimantapkan wajib dijalankan serasi yang diatur secara tertulis.
- f. Aktifitas pengontrolan dipertimbangkan dengan cara tertib untuk meyakinkan bahwa tindakan tersebut tetap serasi dan berperan seperti yang diinginkan.

Kepala lembaga pemerintah mesti mengenali, membukukan serta mengkomunikasikan laporan dalam kerangka dan saat yang tepat. Informasi dan komunikasi tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan dengan efektif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2013 mengenai metode pengontrolan intern.

Pengamatan pengontrolan intern di lembaga pemerintah merupakan suatu hal yang harus bagi pimpinan lembaga pemerintah. Pengamatan pengontrolan intern dijalankan lewat melalui pengamatan yang berkesinambungan, pertimbangan terpisah dan kelanjutan usulan hasil pemeriksaan dan reviu lainnya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 mengenai metode pengontrolan intern.

Pengembangan Hipotesis

Kontribusi Penerapan Akuntansi Berasas AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Implementasi Ketetapan Akuntansi Instansi Pemerintahan dapat memastikan kalau informasi finansial ditata serasi dengan regulasi yang ada. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ketetapan yang ditata menjalankan kriteria laporan yang bermanfaat untuk pemakainya. Laporan yang bermanfaat adalah parameter kalau informasi finansial mengamalkan kriteri laporan, kemudian informasi finansia yang ditata oleh objek institusi tersebut akan bermutu (Wijayanti & Rahmayati, 2018). Kajian pikir yang dilakukan oleh Wijayanti dan Rahmayati (2018) memberikan kesimpulan kalau penerapan akuntansi akrual memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan yang dilakukan oleh Mardiana dan Fahlevi (2017), memberikan hasil implementasi ketetapan akuntansi

pemerintah (SAP) aktual memiliki pengaruh terhadap kapasitas informasi finansial. Dari paparan tersebut, bahwa bisa disimpulkan hipotesis yaitu:

H1: Implementasi Akuntansi Berbasis Aktual memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kontribusi Metode Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Metode pengontrolan internal instansi pemerintah adalah prosedur prosedur yang terpadu pada perbuatan maupun aksi yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari pimpinan dan aparatur untuk menyampaikan ketentuan yang sesuai untuk terlaksananya sasaran organisasi lewat aktivitas yang mempan dan efisien, kecakapan informasi finansial dan kepatuhan terhadap aturan perundangan (Widari & Sutrisno, 2017). Riset yang dilakukan dari kajian pemikiran menyatakan kalau metode pengontrolan intern memiliki pengaruh terhadap kapasitas informasi finansial. Senada dengan riset Rokhlinasari dan Hidayat (2016), menyatakan bahwa metode pengontrolan internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari paparan tersebut, maka bisa disimpulkan hipotesis yaitu:

H2: Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kontribusi Teknologi dan Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Teknologi dan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi komunikasi pada manajemen finansial daerah, akan mengembangkan prosedur negosiasi serta informasi lainnya, ketepatan pencatatan, dan memberikan informasi dan keluaran lainnya yang lebih tepat waktu. (Basukianto, 2015). Riset yang dilakukan oleh Mutiana dkk (2017) menyatakan teknologi dan informasi memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan riset Basukianto (2015) juga menyimpulkan kalau teknologi dan informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari paparan tersebut, maka bisa disimpulkan praduga yaitu:

H3: Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini memanfaatkan desain kuantitatif, karena kajian ini disuguhkan secara statistik. Desain kuantitatif bisa juga bermakna sebagai desain riset yang berassaskan pada filsafat positivisme, dipakai untuk melakukan riset pada populasi atau sampel, pengambilan data memanfaatkan instrumen penelitian, analisa data menggunakan angka-angka, dengan maksud untuk mengukur hipotesis yang sudah ditentukan Sugiyono (2016).

Populasi yaitu bagian konvensional terdiri pada pokok atau topik dengan taraf dan keunikan tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Populasi yang dipakai dalam riset ini adalah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang keuangan se Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 427 pegawai berassaskan data Dinas Kepegawaian, Diklat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019. Sampel adalah sebagian dari ukuran dan spesifik populasi (Sugiyono, 2016). Kebanyakan kasus, tidak mungkin untuk mempelajari semua komponen populasi, jadi kita menyesuaikan perwakilan populasi, yang disebut sampel (Ferdinand, 2014). Gunakan rumus Slovin untuk menentukan nilai terukur dari keseluruhan sampel, yang mencakup ketidakakuratan karena kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan sampel. Berdasarkan perhitungan rumus tersebut memperlihatkan bahwasanya jumlah informan dalam riset ini adalah 207. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan 207 kuisisioner yang akan dibagikan secara langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di bagian keuangan se Kabupaten Padang Pariaman.

Data yang dipakai di kajian ini yaitu data primer merupakan data yang terus dihimpun serta didapat penulis (Sugiyono, 2016). Data primer dalam riset ini adalah wawancara serta kuesioner dengan Kepala Dinas Pekerjaan Daerah, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Akunting. Cara untuk pengambilan data dalam riset ini memanfaatkan kuesioner, dimana kuesioner yakni teknologi pengambilan data yang dijawab dengan menyampaikan rangkaian pertanyaan yang ditulis kepada narasumber. (Sugiyono, 2016).

Analisa data adalah metode yang dipakai untuk melihat hubungan antar variabel. Analisis data memiliki sasaran untuk mengemukakan riset empiris dalam bentuk statistik deskriptif. Data ini menjelaskan spesifik narasumber, terutama informasi yang berkaitan dengan variabel kajian yang digunakan pada uji hipotesis serta untuk menguji usulan yang diajukan. Analisis statistik inferensial dari hipotesis penelitian dapat menarik data (Ferdinand, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah:

Tabel 1
Uji Normalitas

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	0,200	Normal
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,200	Normal
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,200	Normal
4	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,200	Normal

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai masing-masing variabel tersebut telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Nilai VIF	Toleransi	Batas VIF	Keterangan
1	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	1,289	0,776	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1,276	0,784	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,014	0,986	10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Hasil dari Tabel 2. nilai *tolerance* terlihat bahwa tidak ada variabel independen dengan nilai *tolerance* kurang dari 10% yaitu tidak ada korelasi antar variabel independen dengan nilai lebih besar dari 90%. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. Variabel dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk menguji ada tidaknya varians yang tidak sama dari residual suatu pengamatan ke residual pengamatan yang lain. Jika terjadi heteroskedastisitas berarti varians residual tidak sama atau tidak tetap, sehingga penggunaan regresi tidak efisien. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tanpa gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilaksanakan dengan memakai metode korelasi Spearman. Pada dasarnya uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah variabel prediktor memiliki berpengaruh signifikan terhadap nilai residual. Residual normal adalah residual dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Lebih jelasnya dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Uji Heterokedastisitas

No.	Variabel	Nilai Sig.	Batas Sig.	Keterangan
1	Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	0,367	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,913	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,527	0,05	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 3 untuk variabel implementasi akuntansi berbasis akrual (X1) sebesar 0,367 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,367 > 0,05$) maka dinyatakan data implementasi akuntansi berbasis akrual (X1) adalah homogen, selanjutnya, untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X2) diperoleh sebesar 0,913 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti ($0,913 > 0,05$) dan variabel ini berarti memiliki varians yang homogen. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) diperoleh sebesar 0,527 dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti ($0,527 > 0,05$) dan variabel ini berarti memiliki varians yang homogen.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan empat predictor yaitu implementasi akuntansi berbasis akrual (X₁), sistem pengendalian intern pemerintah (X₂), pemanfaatan teknologi informasi (X₃), dan kualitas laporan keuangan (Y). Model regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui bentuk pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil perhitungan *SPSS For Windows Release 24.0* diperoleh tabel analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 4
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	12,667	3,677	
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	0,113	0,043	0,165
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,148	0,042	0,219
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,511	0,053	0,535

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Tabel 4. menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut :

$$Y = 12,667 + 0,113X_1 + 0,148X_2 + 0,511 X_3$$

Model regresi tersebut mempunyai makna :

- Konstanta: 12,667, Jika variabel kompetensi implementasi akuntansi berbasis akrua, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dianggap konstan, maka rata-rata kualitas laporan keuangan sebesar 12,667.
- Koefisien regresi X_1 (Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua). Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai coefficients (b1) adalah 0,113. Hal ini berarti jika variabel implementasi akuntansi berbasis akrua mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) poin, sementara variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan kualitas laporan keuangan sebesar 0,113.
- Koefisien regresi X_2 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai coefficients (b2) adalah 0,148. Hal ini berarti jika variabel sistem pengendalian intern pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) poin, sementara variabel implementasi akuntansi berbasis akrua dan pemanfaatan teknologi informasi dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan kualitas laporan keuangan sebesar 0,148.
- Koefisien regresi X_3 (Pemanfaatan Teknologi Informasi). Berdasarkan perhitungan regresi berganda diperoleh nilai coefficients (b3) adalah 0,511. Hal ini berarti jika variabel pemanfaatan teknologi informasi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) poin, sementara variabel kompetensi implementasi akuntansi berbasis akrua dan sistem pengendalian intern dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan kualitas laporan keuangan sebesar 0,511.

Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai F hitung menurut tabel lebih besar dari nilai F, maka merupakan hipotesis alternatif, yaitu semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Analisis output SPSS dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5
Uji Simultan

F Hitung	F Tabel	Sig	Adjusted R Square
41,506	2,649	0,000	0,371

Pada Tabel 5 dapat dilihat pada kolom *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,371. Hal ini berarti secara simultan kontribusi variabel implementasi akuntansi berbasis akrual (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) memiliki kontribusi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Padang Pariaman (Y) sebesar 0,371 atau 37,1% yang berarti sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan tabel F_{hitung} diperoleh nilai sebesar 41,506 dengan nilai probabilitas (sig)=0,000. Nilai F_{hitung} 41,506 > F_{tabel} 2,649 (F_{tabel} lihat pada lampiran), dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$; maka H_1 diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) implementasi akuntansi berbasis akrual (X_1), sistem pengendalian intern pemerintah (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Y).

Uji t (Parsial)

Uji t dipakai untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang dipakai adalah 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat kepercayaan, penerimaan hipotesis alternatif bahwa variabel independen mempengaruhi secara parsial variabel dependen. Analisis uji T juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Uji t

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig.	Keterangan	
				H0	H1
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual	3,115	1,971	0,002	-	✓
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4,529	1,971	0,000	-	✓
Pemanfaatan Teknologi Informasi	8,753	1,971	0,000	-	✓

Sumber: Data primer yang diolah (2021)

Pada Tabel 6 variabel implementasi akuntansi berbasis akrual (X_1) diperoleh nilai = 3,115 dengan signifikansi 0,002 dimana $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu yang berbunyi “ada pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman”. Pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) diperoleh nilai = 4,529 dengan signifikansi 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu yang berbunyi “ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman”. Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) diperoleh nilai = 8,753 dengan signifikansi 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu yang berbunyi “ada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman”.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 3,115 dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan hasil uji regresi

menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,113 menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Akruwal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Implementasi Ketetapan Akuntansi Instansi Pemerintahan dapat memastikan kalau informasi finansial ditata serasi dengan regulasi yang ada. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ketetapan yang ditata menjalankan kriteria laporan yang bermanfaat untuk pemakainya. Laporan yang bermanfaat adalah parameter kalau informasi finansial mengamalkan kriteri laporan, kemudian informasi finansia yang ditata oleh objek institusi tersebut akan bermutu (Wijayanti & Rahmayati, 2018).

Kajian pikir yang dilakukan oleh Wijayanti dan Rahmayati (2018) memberikan kesimpulan kalau penerapan akuntansi akrual memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan yang dilakukan oleh Mardiana dan Fahlevi (2017), memberikan hasil implementasi ketetapan akuntansi pemerintah (SAP) akrual memiliki pengaruh terhadap kapasitas informasi finansial. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian Dianne Natalia Christanti (2010) yang melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Akuntansi Akruwal dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan". laporan." Kualitas laporan keuangan. Widyawati (2015) melakukan penelitian lanjutan yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo". berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan dan berpengaruh signifikan. Kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten sidoarjo.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmawati (2016) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal di Sekretariat DPRD Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 hasil penelitiannya adanya perbandingan dalam jumlah laporan keuangan yang disajikan dan adanya penambahan pos-pos dalam laporan keuangan berbasis akrual artinya jika SAP telah diterapkan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas LKPD. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Widuri (2013) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DDPKAD) Kabupaten Toraja Utara dengan hasil penelitian bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lasoma (2007) dengan judul penelitian Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan hasil penelitian bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable independent terhadap variable dependen dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4,529 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,148 menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan

penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Dengan begitu, maka penyelenggaraan keuangan atas kegiatan pemerintahan dapat mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien.

Indikator untuk menilai variabel ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, ialah lingkungan pengontrolan, pengukuran resiko, aktivitas pengontrolan isu dan komunikasi serta pemantauan. Menurut data jawaban responden, rata-rata responden menjawab kadang-kadang untuk tiap-tiap indikator pengukuran, yang artinya dari kelima elemen pengontrolan hal yang demikian masih belum dijalankan secara tepat sasaran. Menurut hasil pengujian hipotesis bisa disimpulkan bahwa metode pengontrolan intern pemerintah berdampak kepada mutu laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin bagus pengaplikasian SPIP karenanya semakin bagus pula mutu laporan keuangan yang diciptakan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Yosefrinaldi (2013) yang mengungkapkan bahwa metode pengontrolan intern pemerintah berdampak positif kepada mutu laporan keuangan pemerintah Daerah. Kemudian, Yudianta & Erawati (2012) dengan hasil penelitiannya bahwa pengontrolan intern akuntansi berdampak positif kepada mutu akuntansi. Zuliarti (2012), pengontrolan intern akuntansi berdampak positif signifikan kepada keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Daerah.

Pengontrolan intern yakni komponen dari manajemen resiko yang seharusnya dijalankan oleh tiap-tiap institusi atau organisasi untuk menempuh tujuan institusi atau organisasi. Penggunaan pengontrolan intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas mutu atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Metode pengendali intern mencakup bermacam-macam alat manajemen yang bertujuan untuk menempuh bermacam-macam tujuan yang luas. Tujuan hal yang demikian yakni menjamin kepatuhan kepada regulasi dan aturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengontrolan intern yakni fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan isu dalam pembentukan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. (Mulia, 2019).

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Hal ini dikarenakan oleh belum terselesainya kekurangan kas oleh bendahara mengakibatkan seringnya laporan neraca per 31 Desember 2013 tidak akurat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Nugraha dan Susanti (2010) mengungkapkan metode pengontrolan internal berdampak positif kepada keandalan laporan keuangan. Penelitian lainnya juga dilaksanakan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) meneliti dampak kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi isu, dan pengontrolan intern akuntansi kepada poin isu pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tak memberi pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, padahal pemanfaatan teknologi informasi dan pengontrolan intern akuntansi memberi pengaruh terhadap isu pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Indriasari dan Nahartyo (2008) juga mengungkapkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berdampak signifikan {kepada} ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable independent terhadap variable dependen dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 8,753 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,511 menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, juga sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Indriasari & Nahartyo, 2008). Meskipun banyak kemudahan yang didapat dari pemanfaatan teknologi informasi, Yosefrinaldi (2013) menyebutkan kelemahan dari teknologi berupa komputer diantaranya, sistem komputer tidak mudah beradaptasi jika terjadi perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi membutuhkan waktu yang lama, serta biaya pemasangan instalasi yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Zuliarti (2012) dengan hasil, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Kemudian, Yosefrinaldi (2013), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Ariesta (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Delanno & Deviani (2013) juga menunjukkan hasil bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini ialah, Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Saran

Penelitian selanjutnya menambahkan periode penelitian yang lebih panjang sehingga dapat menggali variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Peneliti selanjutnya semoga dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintahan Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 69–80.

- Anwar, S. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Basukianto, F. C. P. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) Hal*, 188–200.
- Ferdinand, A. (2014). *Research Method Management, Research Guidelines for Thesis Writing*. Thesis and Dissertation in Management Sciences, 5 edition. Semarang: Badan
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *STAR–Study & Accounting Research*, 11(1), 1–14.
- Kiranayanti, I. A. E., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Kusumawati, D. (2017). *Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) G4 (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015)*.
- Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 30–38.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 15.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Noviyanti, M. A. (2015). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akruar Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)*. Fakultas Ekonomi Unpas.
- Pradono, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(2).
- Pristiani, P., & Mahmud, A. (2016). Perbedaan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruar Berdasarkan Demografi Pegawai. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).
- Rokhlinasari, S., & Hidayat, A. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bank BJB Syariah Cirebon. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Rusdiana, A., Irfan, M., & Irfan, M. (2014). *Sistem informasi manajemen*. Pustaka Setia.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah kota Semarang*.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sukmaningrum, T., & Harto, P. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada*

- Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang*). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Widari, L., & Sutrisno, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 5(10), 117–126.
- Wijayanti, N., & Rahmayati, A. (2018). *PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SRAGEN*. IAIN ska.
- Zoelisty, C., & Adityawarman, A. (2014). *Amanah sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.